

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Achmad Ali, "Menguak Tabir Hukum.", Kencana, Jakarta, 2017.
- Amarudin, dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum. ", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Arie Siswanto, "Hukum Persaingan Usaha.", Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Arie Siswanto, "Hukum Persaingan Usaha.", Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum.", Mandar Maju, Bandung, 2008.
- C.S.T. Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia.*", Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Elyata Ras Ginting, "Hukum Anti Monopoli Indonesia: Analisis Dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Hermansyah, "Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.", Kencana, Jakarta, 2009.
- Jhony Ibrahim, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.", Bayu Media, Malang, 2006.
- Jhony Ibrahim, "Teori Metode Dan Penelitian Hukum Normatif.", Bayu Media, Malang, 2007.
- Kaelan, "Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi.", Paradigma, Yogyakarta, 2010.
- Lili Rasjidi dan Sonia Liza, "Dasar-Dasar Falsafah Dan Teori Hukum.", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Mudakir Iskandar Syah, "Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum.", Jala Permata, Jakarta, 2007.
- Munir Fuady, "Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat.", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Nadir, "Hukum Persaingan Usaha.", UB Press, Malang, 2015.
- Nurimansjah. "*Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli, Dan Regulasi.*",

LP3ES, Jakarta 1993.

Riduan Syahrani, “Rangkuman Intisari Ilmu Hukum.”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Ronny Hanitijo Soemitro, “Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri.”, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988.

Soerjono Soekanto, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat”, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif.”, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.

Susanti Adi Nugroho, “Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Susanti Adi Nugroho, “*Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.*”, Mahkamah Agung, 2002.

Tuti Rastuti, “Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan.”, Refika Aditama, Bandung, 2015.

Tuti Rastuti, *et.al.* “Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan.”, Refika Aditama, Bandung, 2018.

Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan.*”, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen IV Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 9 Huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 Tentang Integrasi Vertikal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan.

### C. Jurnal

A.M. Tri Anggraini, Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Per Se Illegal Atau Rule of Reason, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tesis, Jakarta, 2003.

A.M. Tri Anggraini, Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Wordpress.Com*.

Agustiro Nugroho Aribowo, Kepastian Hukum Pengikatan Akta Perjanjian, *Jurnal Surya Kencana Satu*, Vol. 11, 2020.

Ahmad Fajar Heriani dan Awaliani Kharisma Septiana, Penggunaan Pendekatan Perse Ilegal Dan Rule Of Reason Dalam Penyelesaian Kasus Praktek Monopoli Dalam Pelayanan Regulated Agent Pada PT Angkasa Pura Logistik Di Bandara Udara Sultan Hasanuddin, *Supremasi Hukum*, Vol. 15, 2019.

Albert A Foer, *The Political-Economic Nature of Antitrust*, St. Louis

University Law Journal, Vol. 27.

Association American Bar, Section of Antitrust Law, Monograph 23, The Rule of Reason, 1999.

Devy K. G Sondakh dan Mercy M. M Setlight, Analisis Perjanjian Integrasi Vertikal Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Lex Et Societatis*, Vol. VI, 2018.

Dewi Meryanti, Praktek Monopoli Dalam Industri Air Bersih Di Pulau Batam Di Tinjau Dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara No. 11/KPPU-I/2008 Tentang Praktek Monopoli Oleh PT. Adhy Tirta Batam), Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Dudung Mulyadi dan Ibnu Rusydi, Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat, Vol. 05, 2017.

Edi Pranoto, Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15, 2018.

Hanifa Prasetyowati, *et.al*, Analisa Yuridis Larangan Perjanjian Integrasi Vertikal Sebagai Upaya Pencegahan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, 2017.

I Ketut Karmi Nurjaya, Peranan KPPU Dalam Menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Dinamika Hukum*, Vol. 9, 2009.

Ida Bagus Kade Benol Pemadi dan A.A Ketut Sukranatha, Konsep Rule Of Reason Untuk Mengetahui Praktek Monopoli, *Hukum Bisnis Fakultas Hukum UNUD*.

Johan Erwin Isharyanto, Gagasan Konstitusional Ekonomi Indonesia Dalam Kerangka Pasal 33 UUD 1945, *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 17, 2020.

Mansur Armin, Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Negara Berkembang (Studi Kasus Putusan KPPU Dalam Kasus Tamasek, *Jatiswara file:///D:/JURNAL PERSAINGAN USAHA/37-1-76-1-10-20171012 (1).pdf*, Tahun 2017.

Muhammad Adib, Persaingan Tidak Sehat Grab Dan Mitra, Oraski Minta

KPPU Bersikap.

Nelly Pinangkaan, Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, *Lex Administratum*, Vol. 03, 2015.

Oinike Natalia Harefa, Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls Dan Reinhold Neibuhr, *Sundermann*, Vol. 13, 2020.

Revina Aprilia Dewantari, Penerapan Teori Efisiensi Dalam Pendekatan Rule Of Reason Pada Pembuktian Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Privat Law*, Vol. 06, 2018.

Robert Bork, The Rule of Reason and the Per Se Concept: Price Fixing and Market Division, *Yale Law Journal*, Vol. 75, 1966.

Rosdalina Bukindo dan Laila F Bamatraf, Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakkan Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15, 2017.

ST Nurjannah, Penguasaan Pasar Melalui Integrasi Vertikal, *Jurisprudentie*, Vol. 04, 2017.

ST Nurjannah, Penguasaan Produksi Melalui Integrasi Vertikal (Ditinjau Dari UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurisprudentie*, Vol. 04, 2017.

Thomas E Sullivan dan Herbert Hovenkamp, *Antitrust Law Policy and Procedure, Cases, Material, Problem*. Virginia, Lexis Law Publishing, 1999.

Vanessa dan Ariawan, Analisis Terhadap Integrasi Vertikal Ditinjau Dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Prakterk Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-I/2019), *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 3, 2020.

Yerobeam Saribu, Tinjauan Konstitusional Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum Pasa Proses Penangkapan Bagi Seseorang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana, *Lex Administratum*, Vol. VI, 2018.

#### **D. Surat Kabar**

Diskriminasi Order Driver, KPPU Sebur Grab Langgar Persaingan Usaha, dalam Viva.Co.Id.

Eka Santhika, Grab Cetak Pendapatan Rp 13,9 Triliun, dalam CNN Indonesia, Bandung, 3 Oktober 2020.

Muhammad Adib, Persaingan Tidak Sehat Grab Dan Mitra, Oraski Minta KPPU Bersikap.

#### **E. Lain-lain**

*Black's Law Dictionary*

*Encarta Encyclopedia*, 2007. [www.encarta.msn.com/perse/html](http://www.encarta.msn.com/perse/html).

KPPU, KPPU Jatuhkan Sanksi Grab Dan TPI, [kppu.go.id](http://kppu.go.id).

KPPU, Meraup Pasar E-Commerce, [kppu.go.id](http://kppu.go.id).

*Pasal 14 UU No, 5 Tahun 1999*, n.d.

*Wawancara Bersama Rifqy Darmawan, Staf Penegakan Hukum KPPU Kanwil III, Tanggal 11 Desember 2020 Pukul 10.00 WIB.*, n.d.

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id).